



# LAPORAN LAYANAN EDUKASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2019



## A. PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) adalah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk mengelola pembiayaan serta menjaga agar risiko yang timbul masih dalam batas yang terkendali. Pembiayaan diperlukan karena negara kita menganut prinsip anggaran yang defisit dan berimbang, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara yang besarnya melebihi dari angka penerimaan yang dapat dihimpun oleh negara diperlukan pembiayaan agar pembangunan tetap bisa berjalan.

Pembiayaan itu sendiri terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri, Sedangkan surat berharga negara terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Pembiayaan tersebut disesuaikan dengan peruntukannya. Pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan serta manfaat dan kegunaan pembiayaan itu sendiri dalam membiayai anggaran negara masih sangat minim, sehingga tak jarang hal tersebut menimbulkan persepsi negatif mengenai pembiayaan.

Berdasarkan PMK no 234 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan program kehumasan dan hubungan investor terkait pelayanan data, informasi dan kerjasama edukasi pengelolaan pembiayaan dan risiko. Oleh karena itu, selain melaksanakan *core* fungsi, DJPPR juga harus melaksanakan fungsi edukasi kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat mengetahui definisi dan kegunaan serta diharapkan nantinya setelah mengetahui manfaat dari pembiayaan itu sendiri, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam aktifitas pembiayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang berasal dari dalam negeri.

### 2. STAKE HOLDER

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan para *stake holder* baik internal maupun eksternal. DJPPR juga membina hubungan baik dengan *stake holder* yang berhubungan dengan layanan edukasi DJPPR seperti:

- 1) Institusi Perguruan Tinggi
- 2) Kalangan akademisi
- 3) Mahasiswa
- 4) Kementerian/Lembaga
- 5) Pemerintah Daerah
- 6) Masyarakat.

## B. PELAKSANAAN LAYANAN EDUKASI

### 1. PROGRAM MAGANG

Program magang merupakan salah satu layanan edukasi DJPPR. DJPPR selaku instansi pemerintah yang mengimplementasikan berbagai macam bidang keilmuan membuka peluang kepada mahasiswa yang ingin membandingkan teori dan praktik, serta memperoleh pengalaman di dunia kerja dengan mengikuti program magang di DJPPR. Mahasiswa yang mengikuti magang merupakan mahasiswa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi salah satu komponen mata kuliah, yang mana biasanya merupakan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir sembari mempersiapkan untuk tugas akhir ataupun skripsi maupun mahasiswa reguler yang ingin memperoleh ilmu dan pengalaman dari sisi yang berbeda dari yang diperoleh di kampus. Selain itu, terdapat juga mahasiswa yang ingin menemukan ide untuk diajukan sebagai bahan penulisan tugas akhir.

Pada tahun 2019, program magang dilaksanakan dalam dua *batch*, yakni *batch* I pada Januari-April 2019 dan *batch* II pada Juni-Agustus 2019. Setiap periode *batch* magang, terdapat kelas pengayaan yang terjadwal pada Rabu dan Jumat tiap minggu. Tabel 1.1 adalah tabel yang menerangkan judul materi yang dibawakan pada kelas pengayaan.

Tabel 1.1  
Materi Pengayaan Program Magang DJPPR

No.	Materi Pengayaan	Unit Pemateri
1.	Overview Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi
2.	Kode Etik, Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko DJPPR	Bagian Kepatuhan Internal
3.	Pengelolaan Utang Indonesia	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
4.	Manajemen Talenta Kementerian Keuangan	Bagian Sumber Daya Manusia
5.	Bond Market	Direktorat Surat Utang Negara
6.	Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
7.	Islamic Finance	Direktorat Pembiayaan Syariah
8.	Project Financing Sukuk	Direktorat Pembiayaan Syariah
9.	Bonds Stabilization Framework	Direktorat Surat Utang Negara
10.	Investor Relation	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
11.	Strategi Pengelolaan Pembiayaan	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
12.	Financial Market Infrastructure	Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
13.	Asset Liability Management	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
14.	Loan and Grant	Direktorat Pinjaman dan Hibah
15.	Debt Recording and Management System	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
16.	International Finance	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
17.	Risk Management	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
18.	Project Financing Public Private Partnership	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Peserta program magang diisi oleh mahasiswa/i yang berasal dari berbagai latar program studi dan perguruan tinggi. Setiap tahun, DJPPR menerima aplikasi lamaran program magang cukup banyak. Sehingga DJPPR harus menyeleksi calon peserta program magang karena keterbatasan ruangan. Tabel 1.2 berikut ini menerangkan asal usul mahasiswa/i program magang DJPPR tahun 2019.

Tabel 1.1  
Peserta Program Magang DJPPR

No.	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jumlah Peserta
1.	Diablo Valley College Amerika Serikat	S1 Bisnis Administrasi	1
2.	National University of Singapore	S1 Ilmu Ekonomi	1
3.	Universitas Telkom	S1 Akuntansi	2
4.	Universitas Kristen Satya Wacana	S1 Ilmu Ekonomi	2
		S1 Akuntansi	1
6.	UIN Raden Intan Lampung	S1 Perbankan Syariah	1
7.	Universitas Indonesia	S1 Ilmu Administrasi Negara	1
		S1 Ilmu Ekonomi Islam	1
		S1 Manajemen	1
8.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	S1 Akuntansi	1
9.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	S1 Akuntansi	1
10.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	S1 Manajemen	1
11.	Universitas Siliwangi	S1 Ekonomi Syariah	1
12.	Universitas Atma Jaya	S1 Pembangunan/ S1	3
		S1 Manajemen SDM	1
13.	Universitas Maranatha Bandung	S1 Manajemen	7
14.	Institut Tazkia	S1 Ekonomi Syariah	3
		S1 Manajemen Bisnis Syariah	1
15.	Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka	S1 Ekonomi Islam	1
16.	Universitas Pendidikan Indonesia	S1 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	2
17.	Universitas Gunadarma	S1 Ilmu Komunikasi	1
18.	Universitas Trisakti	S1 Manajemen	5
		S1 Akuntansi	2
19.	Politeknik Negeri Jakarta	D3 Keuangan dan Perbankan	3
20.	Universitas Syiah Kuala	D3 Keuangan dan Perbankan	8
21.	Kalbis Institute	S1 Informatika	1
22.	Universitas Diponegoro	S1 Psikologi	1
23.	Politeknik Keuangan Negara STAN	D3 Akuntansi	9
<b>Total</b>			<b>63</b>

Program pengayaan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para mahasiswa tentang tugas dan fungsi utama dari DJPPR sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, serta meminimalisir pandangan negatif masyarakat terhadap pembiayaan.

Selain itu selama pelaksanaan program magang mahasiswa diminta untuk menyiapkan presentasi pada akhir masa magang. Presentasi ini berupa pemaparan rencana tugas akhir yang akan diajukan oleh mahasiswa. Presentasi tersebut juga berisi hasil dari pengamatan dan penelitian mahasiswa pada DJPPR sebagai konten utama dalam tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa. Harapannya, dengan adanya presentasi yang akan disaksikan oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan DJPPR, dapat membantu mahasiswa memberikan saran dalam menyajikan tugas akhir yang bermanfaat dan berkualitas.

## 2. SOSIALISASI EDUKASI

DJPPR aktif dalam memberikan layanan edukasi baik online maupun offline kepada masyarakat. Dalam memberikan edukasi offline kepada public, DJPPR salah satu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada para mahasiswa, akademisi dan pegawai di Instansi-intansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2019 DJPPR telah melakukan beberapa kali sosialisasi. Tabel 2.1 menjelaskan sosialisasi yang dilakukan oleh DJPPR tahun 2019.

Tabel 2.1  
Sosialisasi DJPPR

No.	Tanggal Sosialisasi	Unit/Perguruan Tinggi
1.	16 Januari 2019	Politeknik Negeri Batam
2.	2 April 2019	Universitas Teuku Umar
3.	16 April 2019	Perwakilan Pegawai Kementerian Keuangan di Sumatera Utara
4.	19 September 2019	Universitas Pendidikan Indonesia
5.	20 September 2019	UIN Mataram
6.	26 September 2019	Universitas Trunojoyo Madura
7.	27 September 2019	Universitas Airlangga
8.	8 Oktober 2019	UIN Raden Fatah
9.	8 Oktober 2019	MAN Insan Cendekia OKI Palembang
10.	11 Oktober 2019	UPN Veteran Yogyakarta
11.	16 Oktober 2019	Universitas Syiah Kuala
12.	24 Oktober 2019	UIN Alauddin Makassar

Selain sosialisasi secara offline, DJPPR juga aktif mensosialisasikan informasi dan edukasi pembiayaan melalui media seperti platform Facebook, Instagram, Youtube, Twitter dan Website. Berikut adalah konten yang telah diunggah oleh akun DJPPR:



a) Facebook

 **Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko** 17 November pukul 21.10 · 🌐

Hai #Rekans bagaimana kabar weekend mu? Sudah melakukan hal yang bermanfaat bagi bumi?

Sabtu (16/10), DJPPR mengadakan acara Green Sukuk Investor Day yang di gelar di CGV Grand Indonesia dan dihadiri 500 undangan yang sebagian besar adalah para investor milenial yang telah membeli Green Sukuk Ritel Seri ST006. Green Sukuk Investor Day dimulai dengan pemutaran film dokumenter "Pulau Plastik" yang menggambarkan sampah plastik di kehidupan masyarakat Bali hingga keluarnya peraturan Pemda mengenai larangan menggunakan plastik di Denpasar, Bali.

Acara dilanjutkan dengan High Level Dialogue pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada para investor SBN Ritel yang telah menjadi pahlawan bagi Indonesia dan pelestarian bumi.

Ayo rekans, kamu masih punya kesempatan memesan ST006 melalui midis pilihanmu sampai 21 November 2019. Berinvestasi sekaligus menjaga bumi, keren kan?

#JadiLebihBijak  
#IniUntukKita  
#PembiayaanUangKita



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

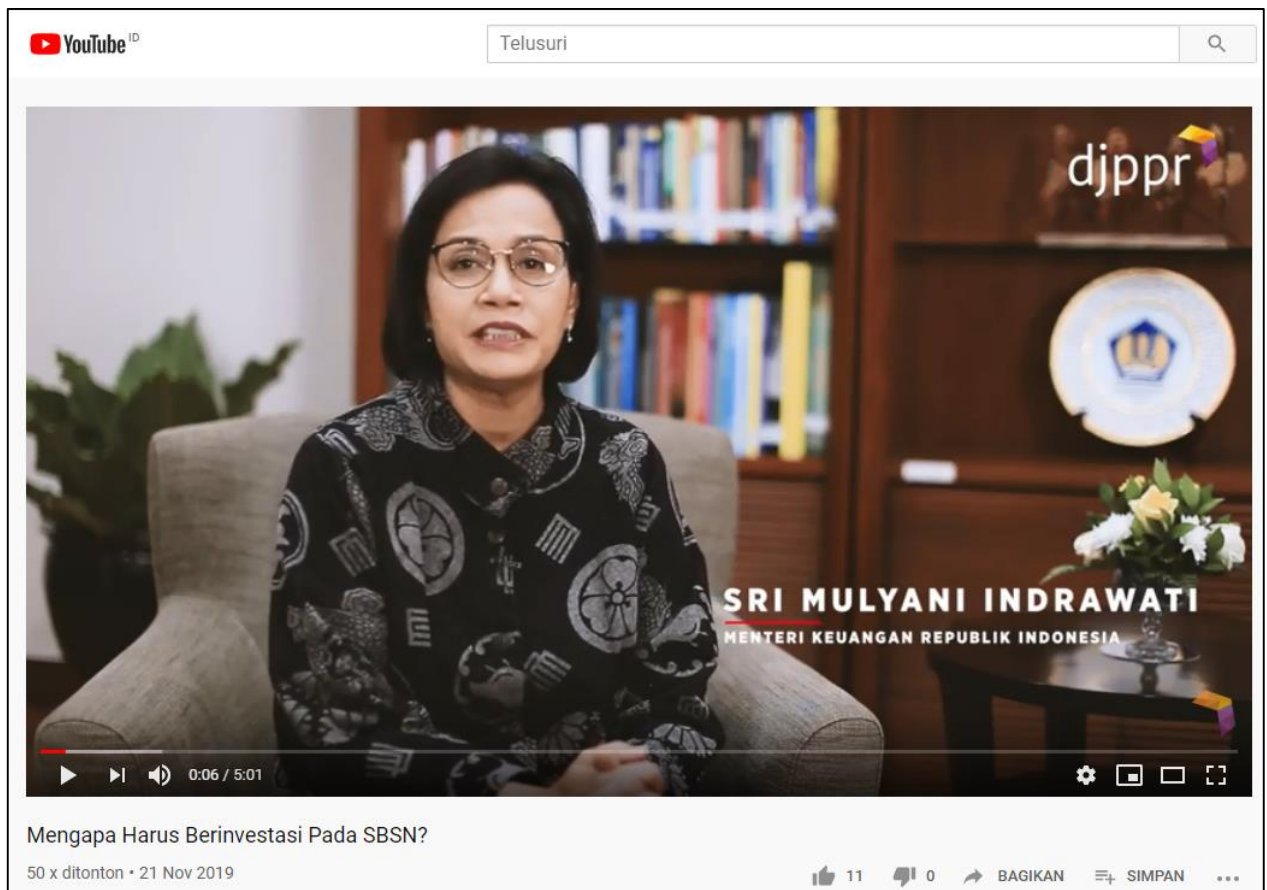
**GREEN SUKUK INVESTORDAY**  
Green Sukuk Ritel for Sustainable Indonesia

**Merawat Bumi Untuk Nanti Dengan Investasi Syariah Masa Kini**


b) Instagram





c) Youtube







d) Twitter






**#PembiayaanUangKita**  @DJPPRkemenkeu · 18 Nov 

(cont.) pemberian bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 12,9 juta siswa, peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah 4,6 ribu unit, Tunjangan Profesi Guru Non PNS 222,6 ribu orang, sertifikasi 40,4 ribu orang, serta pendidikan kecakapan kerja 57,6 ribu orang





   

[Tampilkan utas ini](#)






**#PembiayaanUangKita**  @DJPPRkemenkeu · 18 Nov 

Dari sisi pembangunan SDM, di bidang pendidikan telah terealisasi output Beasiswa Afirmasi Dikti (ADIK) sebanyak 5.224 mahasiswa, tunjangan profesi dosen kepada 133.417 orang dosen, penyaluran Bidikmisi/KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada 356 ribu mahasiswa,





 1   

[Tampilkan utas ini](#)






**#PembiayaanUangKita**  @DJPPRkemenkeu · 18 Nov 

Output belanja negara ditujukan untuk berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan baru mencapai 183,4 km, rel kereta api sepanjang 141,7 km'sp, pembangunan jembatan sepanjang 6.430,9 m, dan pembangunan jalan tol sepanjang 9,3 km





 1   1 

[Tampilkan utas ini](#)



**#PembiayaanUangKita**  @DJPPRkemenkeu · 18 Nov 

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7% (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp91,75 triliun (94,5% dari pagu APBN)

 1   1 

[Tampilkan utas ini](#)



#### e) Website

### Pemerintah Terbitkan Green Sukuk Ritel Pertama Di Dunia, Sukuk Tabungan Seri ST006



Jakarta, 01/11/2019 DJPPR – Pemerintah resmi membuka masa penawaran *Green Sukuk Ritel* seri ST006 secara *online* (e-SBN) kepada investor individu Warga Negara Indonesia pada Jumat, 1 November 2019. Masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 1 – 21 November 2019.

*Green Sukuk Ritel* seri ST006 merupakan penerbitan *Green Sukuk Ritel* pertama sekaligus menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah dan juga dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

"Tujuan penerbitan SBSN atau sukuk ini untuk mendukung APBN kita. Kita ikut membangun negeri ini melalui APBN. Label syariah ini tidak sembarangan, ada label halal dari MUI. *Green* maksudnya komitmen pemerintah membangun proyek-proyek yang bersifat berkelanjutan dan hijau. Selain itu untuk mendukung pasar keuangan syariah Indonesia," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) PPR Luky Alfirman.

Penempatan investasi pada ST006 sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp1 juta hingga Rp3 miliar per orang dengan tenor 2 tahun.

Melalui penerbitan *Green Sukuk Ritel* seri ST006, Pemerintah akan membiayai proyek ramah lingkungan di lima sektor yakni energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur industri, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dan perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Tujuan penerbitan ST006 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2019 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya untuk

### 3. KUNJUNGAN EDUKASI

Selain sosialisasi, DJPPR juga melaksanakan layanan edukasi yaitu kunjungan edukasi di kantor DJPPR. Kunjungan edukasi merupakan salah satu produk layanan informasi yang diberikan oleh DJPPR kepada masyarakat terutama civitas akademika. Kunjungan edukasi ini merupakan kunjungan langsung yang dilakukan oleh pihak universitas ke kantor DJPPR. Pihak universitas dalam hal ini adalah mahasiswa maupun kalangan akademisi dari universitas yang bersangkutan.

Pada tahun 2019, DJPPR khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal, menerima tujuh kunjungan edukasi. Kunjungan edukasi ini diakomodir oleh Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi. Rincian dari kegiatan kunjungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Kunjungan ke DJPPR

No.	Tanggal Kunjungan	Unit Fakultas/ Perguruan Tinggi
1.	6 Februari 2019	Universitas Kristen Satya Wacana
2.	13 Maret 2019	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3.	5 Juli 2019	Peneliti Universitas Jambi
4.	14 Agustus 2019	Dosen Universitas Pendidikan Indonesia
5.	18 Oktober 2019	Telkom University
6.	30 Oktober 2019	Politeknik Keuangan Negara STAN
7.	4 November 2019	Universitas Muhammadiyah Malang

#### 4. KERJA SAMA EDUKASI

Selain itu sosialisasi, DJPPR bekerja sama dengan perguruan tinggi yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman. MoU atau kerja sama edukasi merupakan produk terakhir dari layanan edukasi yang diselenggarakan pada tahun 2019, berupa kerja sama antara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko dengan pihak universitas dalam hal pemberian edukasi kepada para mahasiswa di universitas bersangkutan. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah melalui pengembangan pembelajaran akademis dan ilmu pengetahuan di bidang keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Kerjasama ini dilakukukan agar terbentuknya suatu hubungan yang sinergis antara DJPPR dengan universitas dalam hal penyediaan layanan edukasi mengenai keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, dengan berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan substansi pengajaran sesuai bidangnya dari waktu ke waktu, sehingga akademisi, baik kalangan pengajar maupun mahasiswa, dapat berperan sebagai agen perubahan (change agent) dalam rangka mensosialisasikan program kerja pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko secara benar kepada publik melalui kegiatan akademis, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dan masukan untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah. Tabel 4.1 menerangkan daftar kerjasama edukasi yang berhasil ditantangani antara DJPPR dengan Universitas selama tahun 2019.

Tabel 4.1  
Kunjungan ke DJPPR

No.	Tanggal Penandatanganan	Unit Fakultas/ Perguruan Tinggi
1.	16 Januari 2019	Politeknik Negeri Batam
2.	28 Februari 2019	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3.	13 Maret 2019	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
4.	24 Maret 2019	Universitas Kristen Maranatha
5.	28 Maret 2019	Universitas Putera Batam
6.	2 April 2019	Universitas Teuku Umar
7.	30 April 2019	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8.	17 Juli 2019	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
9.	19 September 2019	Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
10.	19 September 2019	Universitas Pendidikan Indonesia
11.	20 September 2019	UIN Mataram
12.	26 September 2019	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
13.	27 September 2019	Universitas Airlangga
14.	27 September 2019	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga
15.	8 November 2019	Institut Teknologi Kalimantan

## 5. PENYELENGGARAAN BOOTH DAN EVENT

DJPPR juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui booth dan event. Salah satu cara yang dilakukan DJPPR agar edukasi publik yang dilakukan agar lebih massif dan merambah ke seluruh lapisan masyarakat adalah dengan aktif berpartisipasi dalam event-event yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan maupun event yang diselenggarakan oleh para Stakeholder DJPPR. Tabel 5.1 menerangkan daftar booth dan event yang diikuti maupun diselenggarakan oleh DJPPR selama tahun 2019.

Tabel 5.1  
Kunjungan ke DJPPR

No.	<u>Tanggal Booth &amp;Event</u>	<u>Lokasi</u>
1.	25 <u>Juli</u> 2019	Booth AIFC di Hotel J.W. Marriot Surabaya
2.	23-24 <u>Agustus</u> 2019	Booth CMSE di JCC <u>Senayan</u>
3.	13 <u>September</u> 2019	Booth <u>Moffest</u> di <u>Dyandra</u> Convention Center
4.	2 <u>November</u> 2019	Booth MGTPS di <u>Politeknik Keuangan</u> Negara STAN
5.	6-8 <u>Desember</u> 2019	Booth Halal Expo Indonesia di ICE BSD

### C. PENUTUP

Laporan ini merupakan dokumentasi Layanan Edukasi DJPPR selama Tahun 2019. DJPPR mengharapkan pembaca mendapat informasi baru mengenai layanan edukasi DJPPR Tahun Anggaran 2019. Kami juga mengharapkan masukan dari pembaca untuk mengoreksi atau menambah informasi yang telah dituangkan dalam laporan edukasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.